



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : P3/

Pembetulan KePembatalan

1721 - A2

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN  

0

1

1

2

  
TAHUN PEROLEHAN PENGHASILAN  

2

0

2

5

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP : 830415451115000

A.2 NIP/ NRP : 197001242023211002

A.3 NAMA : FAIDOL ANWAR, S.Ag

A.4 PANGKAT/ GOLONGAN : IX / IX

A.5 NAMA JABATAN : Penyuluh Agama Pertama

A.6 JENIS KELAMIN : 

V

 LAKI - LAKI  PEREMPUAN

A.7 NIK : 1209103112700084

A.8 STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP  

TK / 00

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN			JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <div>x</div> 21-100-01 <div></div> 21-100-02			
PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI POKOK / PENSIUN		38.947.200
2.	TUNJANGAN ISTRI		2.933.640
3.	TUNJANGAN ANAK		0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN		0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL		3.240.000
6.	TUNJANGAN BERAS		1.520.820
7.	TUNJANGAN KHUSUS		424
8.	TUNJANGAN LAIN - LAIN		0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 1 S.D. 8 )		46.642.084
PENGURANG			
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN		2.332.104
11.	IURANG PENSIUN ATAU IURAN THT		0
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DI BAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA		0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)		2.332.104
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO ( 9 -13 )		44.309.980
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN )		44.309.980
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		54.000.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)		0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		0
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
21.	PPh PASAL 21 DI TANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DI KREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)		0
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DI POTONG DAN DI LUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR		0
	23a. PPh PASAL 21 DI POTONG		0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		0
24.	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR /LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR		0
	24a. PPh PASAL 21 DI POTONG		0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		0

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01  DIPINDAHKAN C.02  PINDAHAN C.03  BARU C.04  PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 

0

0

1

8

0

8

8

0

7

1

1

5

0

0

0

D.2 Nama Instansi Pemerintah : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATU BARA

D.3 ID Sub Unit Organisasi : \_\_\_\_\_

D.4 Tanggal : 

1

5

0

1

2

0

2

6

D.5 NAMA PENANDATANGAN : YUNAINI, S.Kom

D.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah

D.1.1.32.49